## **JAWA TENGAH**

#### Warga NU Pasang Rambu Ajakan Bersholawat

SALATIGA (KR) - Warga Nahdatul Ulama (NU) Kecamatan Sidomukti Salatiga memasang rambu-rambu lalu lintas dan ajakan bersholawat di Jalan Lingkar Selatan (JLS). Salatiga, Jumat (16/9). Ketua Majelis Wilayah Cabang NU Kecamatan Sidomukti Salatiga, KH Mukarom menjelaskan pihaknya memasang 30 rambu ajakan bersholawat.

"Pemasangan ini bentuk kepedulian kami sebagai warga NU dan masyarakat Kota Salatiga terhadap pengguna jalan Lingkar Salatiga. Harapannya dengan rambu tersebut akan meningkatkan konsentrasi para pengendara yang melintas terhadap kondisi jalan yang berbahaya," jelas Mukarom. Selain itu rambu ajakan bershola-wat juga akan menimbulkan ketenangan dan kehati-hatian bagi pengguna jalan di JLS Salatiga.

Camat Sidomukyo, Guntur Junanto mengatakan kegiatan dimulai dengan doa bersama malam hari sebelum pemasangan. "Kami berharap dengan pemasangan rambu tersebut, pengguna JLS jadi nyaman, '

Ratusan warga NU Kecamatan Sidomukti pada Kamis (15/9) malam juga menggelar doa bersama untuk keselamatan para pengguna JLS Salatiga yang selama ini dikenal rawan kecelakaan. Pada acara dimulainya pemasangan rambu, Jumat (16/9) dihadiri Penjabat (Pj) Walikota Salatiga, Sinoeng N Rachma-

"JLS jalam nasional sehingga Pemkot Salatiga saat ini sudah berkoordinasi dengan pemerintah pusat, gubernur dan Dishub Jateng dan Kementerian Perhubungan agar bisa memberikan jalur kejut di beberaoa titik di JLS," kata Sinoeng.

#### TMMD III Sengkuyung Kodim 0718 Sasar Dua Desa

PATI (KR) - Desa Prawoto Kecamatan Sukolilo dan Bermi (Gembong) akan menjadi sasaran TMMD III Sengkuyung Kodim 0718. Pada program yang akan dikerjakan Oktober hingga November tersebut, adalah untuk membantu percepatan ekselerasi pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dandim 0718 Pati, Letkol Inf Catur Irawan, SIP MIP mengatakan, pelaksanaan program TMMD Tahap III dapat berjalan sukses sesuai yang direncanakan.

'Dalam rapat koordinasi sebagai persiapan pelaksanaan TMMD sengkuyung tahap III tahun anggaran 2022, sudah disepakati, masing-masing instansi akan saling membantul program ini,' ucap Letkol Inf Catur Irawan, Kamis (15/9). Rencana TMMD tahap III/20-22, akan menggarap sasaran pokok di desa Prawoto Kecamatan Sukolilo, pengecoran jalan desa perbatasan Kabupaten Pati dengan Kabupaten Grobogan, ukuran 650 x 3 x 0,15M. Dan di desa Bermi kecamatan Gembong, melakukan pengecoran (betonisasi) jalan penghubung antar desa 830 x 2,5 x 0,12M. Kemudian untuk sasaran tambahan RTLH di masing masing desa sebanyak 4 unit rumah. (Cuk)



Dandim 0718, Letkol Inf Catur Irawan, SIP MIP menghadiri rapat koordinasi rencana TMMD Sengkuyung

#### Perbaikan Pasar Kliwon Temanggung

TEMANGGUNG (KR) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten Temanggung sepakat menganggarkan dana Rp 200 juta untuk perbaikan atap pasar Kliwon Utara. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Temanggung Entargo Yutri Wardhono mengatakan atap pasar Kliwon bagian utara

"Akibatnya, bila hujan mengguyur air masuk ke pasar. Lantai pasar seperti banjir. Pedagang terkena dampaknya. Barang dagangan rusak dan pengunjung juga enggan datang," kata Entargo Yutri Wardono, Jumat (16/9). Dikatakan, dana Rp 200 juta dianggarkan pada APBD Perubahan 2022. Perbaikan itu hanya pada satu blok saja, yakni yang terparah mengalami kerusakkan. Memasuki hujan intensif harapan atap Pasar Kliwon yang rusak sudah selesai.

Yutri mengatakan pada tahun 2023, rencana ada perbaikan atap pasar Kliwon Utara secara menyeluruh agar pedagang dan pengunjung pasar bisa beraktivitas secara nyaman dan produktif. Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Temanggung Slamet Eko Wantoro mengatakan di badan anggaran DPRD saat pembahasan APBD Perubahan 2022 dibahas perbaikan atap pasar Kliwon utara Temanggung. "Disetujui Rp 200 juta untuk perbaikan atap pasar Kliwon, tetapi hanya satu blok. Sudah ada rencana perbaikan atap secara menyeluruh di 2023," ka-

Slamet mengatakan perbaikan pada 2022 ini hanya secara darurat. Sedangkan perbaikan menyeluruh pada 2023, karena dimanfaatkan untuk pedagang. Anggota DPRD dari F PKB Ummi Tsuaibah mengatakan pasar daerah yang tidak representatif terutama pasar Kliwon untuk segera diperbaiki. "Pasar Kliwon untuk diperbaiki, kami setuju dianggarkan Rp 200 juta untuk perbaikan atap," kata dia. Ummi mengatakan pada anggaran tahun 2023 diharapkan bisa rehap pasar lebih besar sehingga pedagang bisa lebih nyaman dalam bekerja.

### Dishub Data 1.520 Pelaku Usaha Angkutan Umum

KARANGANYAR (KR) -Sebanyak 1.520 pelaku usaha angkutan umum, ojek konvensional dan ojek online didata dalam program bantuan langsung tunai (BLT) BBM. Dinas Perhubu-

ngan (Dishub) masih akan memverifikasi calon penerimanya sebelum menyalurkan dana bantuan via rekening bank.

Kepala Dishub Karanganyar, Sri Suboko mengatakan data ribuan pelaku usaha angkutan umum tersebut sudah dikunci usai inventarisasi selesai per Senin (12/9). Dari jumlah itu terdata 600-an ojol roda dua dan roda empat, 120-an ojek pangkalan dan awak serta pemilik armada angkutan umum yang tergabung di Organda. Data mereka dihimpun dari

paguyuban masing-masing. Sri Suboko mengatakan, data dari golongan angkot dan bus meliputi pemilik armada, sopir dan kru.

Data dari Dishub tersebut dipaparkan dalam rapat kerja bupati bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Terdapat dua OPD yang juga menyerahkan data sasaran pemberian BLT BBM, yakni Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perdagangan Tenaga Keria Koperasi (Disddagnakerkop) UKM. Tiga OPD tersebut mendapat penugasan menyalurkan BLT BBM bersumber APBD perubahan 2022. Penting diketahui, penyaluran BLT BBM didasari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.07/-2022 tentang Belanja Wajib dalam Rangka Penanganan

Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022. Penjabarannya, Pemerintah Daerah ditugaskan menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial sebesar 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

"Kita belum tahu berapa anggaran pasti untuk program BLT BBM. Tugas kami hanya mendata sasaran saja. Itu pun masih akan diverifikasi agar tidak tumpang tindih yang disasar Dinsos dan Disdag pada program yang sama. Pendataan ini dilandasi NIK. Ada kemungkinan ojol ber-KTP Karanganyar namun narik orderan di luarnya atau sebaliknya," kata Suboko kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (16/9).

Setelah lolos verifikasi, calon penerima diminta membuka rekening bank untuk

mendapat transfer BLT BBM. Seiring hal itu, Bupati akan menerbitkan Perbup tentang penyaluran BLT BBM berikut SK penerimanya. "Semua penyaluran ini berikut by name by addres dilandasi regulasi SK penerima berikut Perbup," katanya.

la tak memungkiri tarif angkutan umum mengalami penyesuaian pascakenaikan harga BBM subsidi. Kenaikan tarif tersebut terjadi secara spontan. Saat ini, ia sedang mengajukan skema kenaikan tarif ke Bupati Karanganyar.



Pemeriksaan kondisi Bus AKAP di garasi.

# Regruping SD Gesikan Ditolak Warga

PURWOREJO (KR) - Kebijakan regruping atau penggabungan SD Gesikan Kecamatan Kemiri dengan SD Paitan, menuai penolakan dari warga dan wali murid. Mereka bahkan mendemo Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo dan meminta kebijakan itu dibatalkan.

tersebut karena menilai jumlah siswa lebih dari batas minimal dilakukannya penggabungan. "Jumlah siswa SD Gesikan 66 dan syarat ketentuan regruping jika siswa di bawah 60 anak. Saya dimintai tolong oleh warga untuk mendampingi mereka memperjuangkan aspirasinya," kata pendamping warga Gesikan dari LSM Tamperak, Sumakmun, menjawab pertanyaan KR, Jumat (16/9).

Ketua Komite SD Gesikan Sujat Hadipawiro menambahkan, warga keberatan SD Gesikan digabung karena sekolah itu memiliki sejarah panjang. SD Gesikan merupakan Sekolah Rakyat (SR) yang didirikan pada tahun 1968. "Kalau saya sebagai orangtua tetap menghendaki jika SD Gesikan tetap berdiri, agar anak cu-

Warga menolak penggabungan cu kami tidak perlu jauh-jauh sekolahnya," ujarnya.

Aksi penolakan itu diwujudkan warga dengan berunjuk rasa di desa, kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Purworejo, DPRD Purworejo, dan kantor Bupati Purworejo. Bahkan, dalam aksi unjuk rasa di gedung DPRD Purworejo, sempat terjadi adu argumentasi ketika Ketua DPRD Purworejo meminta legalitas penunjukan kuasa dari warga kepada LSM Tamperak. Namun, Sumakmun tidak dapat memperlihatkan dengan alasan tertinggal di kantornya. Akhirnya, warga batal menyampaikan aspirasinya kepada anggota DPRD dan mereka memindah aksi ke kantor Bupati Purworejo.

Kepala Desa Gesikan Suryono membenarkan jika pihaknya meminta pendampingan LSM Tam-

perak. Ia menyayangkan LSM tidak boleh masuk mendampingi warga hanya karena alasan tidak bisa menunjukkan surat kuasa. "Betul (didampingi LSM Tamperak-red), saya menyayangkan," katanya. Ketua DPRD Purworejo Dion Agasi Setiabudi mengemukakan, gedung DPRD adalah rumahnya rakyat sehingga pihaknya tidak menolak adanya penyampaian aspirasi itu. Namun, Dion meminta aspirasi tersebut disampaikan oleh wali murid SD Gesikan yang terdampak langsung kebijakan dan warga setempat.

"Soal LSM, saya hanya minta diperlihatkan bukti surat kuasa jika LSM resmi ditunjuk mendampingi warga, jangan sampai masalah di Gesikan, tapi yang demo warga daerah lain. Untuk warga Gesikan, silakan sampaikan aspirasi dan pasti kami terima," ucapnya.

Dion juga mengakui jika kebijakan regruping itu bermasalah di sejumlah SD. "Tidak hanya di Gesikan, misalnya di Gunung Teges, saya prihatin dengan kondisi itu dan meminta pemkab mengkaji

ulang, bahkan menunda, sehingga tidak kebijakan itu tidak mengorbankan anak," tegasnya.

Kepala Disdikbud Purworejo Wasit Diono mengemukakan, kebijakan regruping diterapkan dengan mengacu pada Permendikbud 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Pendidikan.

Aturan menyebut pemerintah kabupaten wajib menyediakan satuan pendidikan dalam iarak maksimal 3 km untuk SD. Selain itu, ada surat edaran Dirjen PAUD Dikdasmen yang menyebutkan sekolah penerima BOS memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 dalam tiga tahun

Kebijakan regruping mulai diluncurkan tahun 2020 dengan terbitnya Perbup 14 tahun 2020. Regulasi itu ditindalanjuti dengan pembentukan tim regruping tingkat kecamatan yang diketuai camat setempat.

"Kami menerima rekomendasi yang dibuat tim regruping tahun 2021 untuk dasar terbitnya SK Bupati Purworejo tentang penggabungan SD Gesikan ke SD Pait-

## Forkopimda Sukoharjo Rutin Sidak Pasar Tradisional

busi, stok dan harga kebutuhan pokok masih terpenuhi. Kepastian tersebut terlihat saat Forkopimda Sukoharjo sering melakukan pemantauan dengan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar tradisional. Dalam kegiatan tersebut juga dipantau terkait kondisi inflasi daerah.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (16/9) mengatakan, Forkopimda Sukoharjo aktif turun ke pasar tradisional memantau langsung distribusi, stok dan harga kebutuhan pokok pangan. Pejabat melakukan sidak untuk melihat secara langsung di pasar tradisional. Hal ini dilakukan setelah pemerintah pusat memberlakukan kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sekaligus membatu inflasi

Dalam pemantauan Forkopimda Sukoharjo meminta keterangpedagang, pembeli dan masyarakat sekitar. Hasilnya diketahui belum ada kendala besar dihadapi terkait stok dan harga bahan pokok pangan. Termasuk distribusi barang dari produsen ke pedagang berjalan lancar.

"Kemarin sidak ke Pasar Bekonang Mojolaban dan sekarang di Pasar Tawangsari. Semua berjalan lancar. Artinya stok dan harga kebutuhan pokok pangan aman. Termasuk distribusi barang lancar. Inflasi daerah mudah-mudahan dapat terkendali setelah ada penyesuaian harga BBM dari pemerintah pusat," ujarnya.

Bupati Sukoharjo menegaskan, kondisi di Kabupaten Sukoharjo sangat diuntungkan dengan melimpahnya hasil dari sektor pertanian dan peternakan yang menjadi andalan daerah untuk memenuhi kebutuhan pokok pangan masyarakat. Bahkan hasil pertamemberikan tambahan pemenuhan kebutuhan pokok pangan daerah lainnya.

Melimpahnya sektor pertanian seperti pada hasil panen padi di Kabupaten Sukoharjo mampu swasembada beras. Hal ini berdampak pada jaminan kebutuhan pangan masyarakat. Jaminan juga berlaku pada harga dimana beras dapat dibeli masyarakat dengan murah. Terpenuhinya kebutuhan beras sebagai sumber makanan utama masyarakat mampu menekan inflasi daerah. "Selain beras masih ada sayuran dan palawija sebagai sumber pokok pangan masyarakat. Sektor pertanian di Sukoharjo mampu berkontribusi bagi daerah," lanjutnya.

Sektor peternakan juga memberikan dampak besar bagi terpenuhinya kebutuhan pokok pangan masyarakat. Bupati menje-

SUKOHARJO (KR) - Distri- an langsung kepada lurah pasar, nian dan peternakan mampu laskan seperti melimpahnya stok hewan ternak salah satunya sapi dimana mampu menjadi jaminan swasembada daging. Ternak ayam, kambing dan lainnya juga banyak di Kabupaten Sukoharjo. Peternakan juga berkontribusi membantu terpenuhinya kebutuhan pokok pangan masyarakat.

> Pemkab Sukoharjo meminta kepada pedagang dan pihak terkait tidak perlu panik setelah ada penyesuaian harga BBM. Masyarakat juga diminta tetap tenang mengingat kebutuhan dapat terpenuhi. "Kalau kebutuhan sudah terpenuhi maka sekarang tinggal pengawasan ke distribusi dan harga. Jangan sampai ada pelanggaran dan inilah peran penegak hukum. Forkopimda Sukoharjo dalam pemantauan ke pasar tradisional juga melibatkan Polres, Kodim 0726, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Sukoharjo," lanjutnya.

## Camat Diminta Pantau Kondisi Warga Kurang Mampu

SUKOHARJO (KR) -

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Sukoharjo menyalurkan bantuan kepada 39 warga kurang mampu. Bantuan diberikan dalam berbagai bentuk seperti pengobatan, biaya hidup, dan lainnya. Pemkab Sukoharjo meminta kepada lurah, kepala desa dan camat aktif memantau kondisi warganya dan apabila membutuhkan bantuan maka bisa diajukan ke Baznas Sukoharjo.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (16/9) mengatakan, Baznas Sukoharjo sudah rutin menyalurkan bantuan dalam berbagai bentuk kepada masyarakat kurang mampu di 12 kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Bantuan diberikan setelah ada pengajuan dari warga. Berbagai bantuan yang diberikan dapat membantu dan meringankan beban masyarakat

kurang mampu. Pemkab Sukoharjo akan terus menyalurkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu bersumber dari Baznas Sukoharjo. Pengajuan bantuan bisa dilakukan warga dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Surat pengajuan tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh Baznas Sukoharjo. Tindak lanjut dilakukan Baznas Sukoharjo dengan melakukan pengecekan kelengkapan data pengajuan warga. Baznas Sukoharjo kemudian melakukan verifikasi kelayakan calon penerima bantuan dengan mengecek secara langsung kondisi warga tersebut.

"Kali ini ada 39 warga yang menerima bantuan dari Baznas Sukoharjo.

Bantuan diberikan dalam berbagai bentuk seperti pengobatan, modal usaha dan lainnya. Pemkab Sukoharjo akan terus membantu masyarakat yang membutuhkan," ujarnya. Etik Suryani meminta kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk langsung mengajukan permohonan ke Bupati Sukoharjo. "Langsung saja ke saya nanti akan ditindaklanjuti melalui Baznas Sukoharjo. Tidak perlu dibawa kemana-mana apalagi lewat mendos dan viral," lanjut-

Pemkab Sukoharjo sebagai bentuk komitmen kepada masyarakat telah meminta kepada lurah, kepala desa dan camat aktif memantau kondisi warganya. Apabila ada warga kurang mampu membutuhkan bantuan maka segara diajukan

permohonan ke Bupati Sukoharjo. Secara khusus Bupati Sukoharjo sudah meminta berulang kali kepada lurah, kepala desa dan camat aktif turun ke masyarakat. Hal ini juga untuk mempermudah dan mendekatkan hubungan serta komunikasi antara pejabat dengan masyarakat. Hal serupa juga berlaku pada para pejabat lain di Pemkab Sukoharjo. Etik Suryani bahkan

menegaskan tidak segan menegur kepada pejabatnya yang tidak mau turun ke masyarakat.

"Bantuan yang bisa diajukan banyak termasuk pendidikan, kesehatan dan rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Terus perbanyak sosialisasi ke masyarakat jadi para lurah, kepala desa, camat dan pejabat harus aktif turun ke masyarakat," lanjutnya.



Bupati Sukoharjo Etik Suryani menyalurkan bantuan dari Baznas kepada warga.